

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Di Madura, fenomena sosial menolak kepemimpinan perempuan sebagai kepala desa masih menjadi kenyataan yang kompleks dan bernuansa. Meskipun perempuan Madura memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun masyarakat, kepemimpinan formal di tingkat desa sering kali dianggap sebagai wilayah yang seharusnya diisi oleh laki-laki. Peran semu perempuan dalam kepemimpinan disebabkan oleh bias gender dan konstruksi sosial masyarakat.<sup>1</sup> Budaya patriarki yang kuat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong penolakan terhadap kepemimpinan perempuan. Di Madura, seperti di banyak masyarakat agraris yang didominasi oleh nilai-nilai patriarkis, peran laki-laki dalam kepemimpinan dianggap lebih sesuai dengan citra tradisional tentang kekuatan, otoritas, dan penjagaan tradisi.

Di Kecamatan Waru misalnya, dengan masyarakat yang fanatis terhadap agama menganggap perempuan sering kali dilihat lebih cocok untuk peran yang mendukung di belakang layar, seperti mengelola rumah tangga atau urusan sosial di dalam komunitas. Selain itu, agama dan nilai-nilai keagamaan juga memainkan peran penting dalam penolakan ini.

---

<sup>1</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, Hoiril Sabariman dan Harsuko Riniwati, "Representasi Feminisme pada Kepemimpinan Perempuan di Madura (Studi Keberhasilan Kepala Desa Perempuan Menjadikan Desa Bunder Sebagai Desa Swakarya dan Desa Swasembada)" *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, Volume 10, No. 2, Juli-Desember 2020, 174.

Meskipun Islam, sebagai agama mayoritas di Madura khususnya di Kecamatan Waru, tidak secara eksplisit melarang perempuan untuk memimpin, interpretasi lokal tentang agama sering kali mendukung paradigma bahwa kepemimpinan formal lebih cocok dipegang oleh laki-laki. Ini tercermin dalam diskursus sosial dan religius di masyarakat, yang sering kali menguatkan norma-norma yang sudah ada.

Masyarakat di Kecamatan Waru dikenal agamis. Masyarakat di sana taat beribadah dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari. Di samping agamis, masyarakat di Kecamatan Waru pada umumnya fanatik, terutama dalam hal kepemimpinan. Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi fakta sosial atas penolakan terhadap kaum perempuan sebagai kepala desa.<sup>2</sup> Dampak dari penolakan terhadap kepemimpinan perempuan di Madura menciptakan tantangan signifikan dalam pencapaian kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Terlepas dari kemampuan dan kualifikasi perempuan dalam bidang administrasi dan kepemimpinan, mereka sering kali menghadapi resistensi yang kuat dan stereotip yang membatasi kemungkinan mereka untuk maju.

Penelitian tentang kepemimpinan perempuan memang sudah pernah dikaji seperti yang dilakukan oleh Saeful yang menegaskan kepemimpinan perempuan memunculkan dua sudut pandang, yakni yang mendukung dan menentangnya. Bagi yang mendukung, mereka meyakini bahwa hadis yang melarang kepemimpinan perempuan bersifat kontekstual dan hanya

---

<sup>2</sup> Sadiq, Salah Satu Tokoh Agama Desa Tampojung Tenggina Kecamatan Waru, *Wawancara Langsung*, 12 Juni 2024.

berlaku pada masa itu. Oleh karena itu, larangan tersebut tidak universal dan tidak berlaku untuk semua waktu. Di sisi lain, mereka yang menolak memandang bahwa larangan tersebut berlaku tidak hanya pada konteks masa lalu, tetapi juga relevan untuk semua zaman. Perdebatan ini menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan perempuan masih menjadi topik yang kontroversial hingga saat ini, dengan sejumlah pihak mendukung dan lainnya menolak konsep tersebut.<sup>3</sup>

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Hartono yang menegaskan beberapa alasan mengapa banyak laki-laki menolak pemimpin perempuan. *Pertama*, mereka cenderung mengikuti stereotip yang telah lama ada. *Kedua*, ada keyakinan bahwa pemimpin perempuan mungkin akan bertindak di luar harapan. *Ketiga*, masih banyak yang percaya bahwa peran pemimpin perempuan berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan pemimpin laki-laki dalam sebuah organisasi.<sup>4</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya. Di mana, penelitian ini ingin melihat kepemimpinan perempuan perspektif fikih siyasah. Hepotesa sementara peneliti menganggap kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan fikih siyasah. Sebab dalam Islam, perempuan diberi kebebasan untuk bekerja asalkan mereka memenuhi syarat-syaratnya, dan mereka memiliki hak untuk bekerja di bidang apa

---

<sup>3</sup> Achmad Saeful, "Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Islam: Telaah atas Hadist Kepemimpinan Perempuan" *SYAR'IE*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021.

<sup>4</sup> Rudi Hartono, "Kepemimpinan Perempuan di Era Globalisasi" *JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, Vol. 1 No. 1 Maret 2021.

pun yang dihalalkan.<sup>5</sup> Seiring dengan munculnya gerakan sosial dan advokasi yang bertujuan untuk mengubah persepsi dan mendorong inklusi gender dalam kepemimpinan lokal. Inisiatif pendidikan dan pemberdayaan perempuan juga menjadi kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan membuka jalan bagi perempuan Madura untuk lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

Secara keseluruhan, fenomena sosial ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara tradisi lokal, agama, dan perubahan sosial di Madura. Meskipun tantangan besar masih ada, langkah-langkah ke arah kesetaraan gender secara perlahan tetapi pasti sedang diambil, menunjukkan potensi besar untuk transformasi positif dalam dinamika sosial dan politik di pulau ini. Sehingga muncullah perempuan yang menjadi kepala desa di Kecamatan Waru. Hal ini didukung fakta yang ada di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan di mana terdapat tiga desa yang dipimpin oleh kepala desa perempuan pada periode 2022-2027.

*Pertama*, di desa Tampojung Tenggina yang dipimpin oleh Ibu Kholida, pada kepemimpinannya telah mengelola sumber pendapatan desa yang diperoleh dari ternak sapi. *Kedua*, di desa Tampoung Guwa yang dipimpin oleh Ibu Siti Aminah, pada kepemimpinannya telah membuat Peraturan Desa yang mengikuti kebiasaan masyarakat. *Ketiga*, di desa Sumber Waru yang dipimpin oleh Ibu Suparma, pada kepemimpinannya telah membina kehidupan sosial dengan membentuk suatu perkumpulan

---

<sup>5</sup> Kurnia Muhajarah dan Silvia Riskha Fabriar, "Menolak Lupa: Potret Kepemimpinan Politik Perempuan Lintas Sejarah" *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, Vol. 3, No. 2 (2021).

pengajian yang diikuti oleh beberapa warga yang diadakan setiap minggu sekali.

Fenomena adanya kepala desa perempuan di Kecamatan Waru tersebut menarik untuk dikaji secara akademis dari perspektif fikih siyasah. Di mana, tolok ukur fikih siyasah tentang kepemimpinan bukan tentang jenis kelamin, melainkan pada kemampuan menjalankan tugas serta amanah dalam memegang kekuasaannya sebagai pemimpin. Berangkat dari pemaparan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait kepemimpinan perempuan sebagai kepala desa di Kecamatan Waru. Maka dari itu, penulis mengangkat penelitian ini ke dalam bentuk judul “Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Perspektif Fikih Siyasah”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kepemimpinan perempuan dalam menjalankan tugas Kepala Desa di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana kepemimpinan Kepala Desa perempuan di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan perspektif fikih siyasah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui kepemimpinan perempuan dalam menjalankan tugas Kepala Desa di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

2. Untuk mengetahui kepemimpinan Kepala Desa perempuan di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan perspektif fikih siyasah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari segi teori, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan menambah pemahaman ilmiah bagi siapa pun yang tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang sistem kepemimpinan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur di perpustakaan IAIN Madura, menjadi tambahan informasi atau wawasan mahasiswa serta dapat menjadi acuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara dalam penelitian yang relevan dengan studi ini.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan bagi masyarakat terkait pelaksanaan kepemimpinan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan mampu diterapkan dalam membina kehidupan masyarakat.

### c. Bagi Peneliti

Adapun bagi peneliti, penelitian ini dijadikan sebagai bahan mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama studi di perguruan tinggi dengan kasus-kasus atau fenomena yang terjadi di masyarakat atau dunia nyata. Penelitian ini juga diharapkan menjadi motivasi dan pembelajaran terhadap penulis tentang kepemimpinan.

## E. Definisi Istilah

Adanya definisi istilah ini, akan memberikan pemahaman mengenai judul dalam penelitian, serta untuk meminimalisir penafsiran yang berbeda. Maka perlu kiranya untuk diartikan secara tegas dan spesifik agar tercipta pemahaman yang utuh. Berikut beberapa definisi istilah yang dimaksud:

1. Kepemimpinan adalah proses di mana seorang pemimpin memanfaatkan pengaruhnya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembangunan hubungan yang positif dengan anggota tim atau bawahan.<sup>6</sup>
2. Kepala Desa adalah individu yang dipilih oleh masyarakat di desa dan diberikan kepercayaan serta wewenang untuk memimpin, membina, dan mengembangkan desa tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Lelo Sintani, dkk, *Dasar Kepemimpinan* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2022), 1.

<sup>7</sup> H. A. Tabrani Rusyan, *Membangun Efektifitas Kinerja Kepala Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 1.

3. Perspektif merupakan sebuah cara pandang atau pemikiran seseorang dalam memahami atau memaknai suatu fenomena tertentu dalam menentukan keputusan untuk menyelesaikan sebuah persoalan.
4. Fikih Siyasah adalah sebuah cabang ilmu fiqh yang berfokus pada aturan-aturan yang terkait dengan urusan politik dan pemerintahan dalam Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Hamzah Kamma, dkk, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)* (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 2.